EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

NURUL HUDA, dkk.

Ekonomi PEMBANGUNAN ISLAM

NURUL HUDA, dkk.

EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM
Edisi Pertama

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN : 978-602-1186-99-2

ISBN (E) : 978-602-422-507-0
15 x 23 cm
xviii, 242 hlm
Cetakan ke-2, Januari 2017

Kencana. 2015.0572

Penulis
Nurul Huda, dkk.

Desain Sampul
tambra23

Penata Letak
Ria

Percetakan
PT Kharisma Putra Utama

Penerbit
K E N C A N A
(Divisi dari PRENADAMEDIA Group)
Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134
e-mail: pmg@prenadamedia.com
www.prenadamedia.com
INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Puji serta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang sangat sederhana ini dapat diselesaikan. Buku ini diberi judul *Ekonomi Pembangunan Islam*. Buku ini lahir sebagai bagian upaya para penulis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam di Tanah Air tercinta ini.

Buku *Ekonomi Pembangunan Islam* muncul karena masih terbatasnya buku-buku dengan tema ini, pada sisi lain perguruan tinggi baik di bawah kewenangan Kementerian Agama maupun Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi semakin bertambah dari sisi jumlah. Buku ini terdiri dari enam bab, yaitu: (1) Paradigma Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam; (2) Ekonomi Pembangunan dalam Perspektif Sejarah; (3) Model Pertumbuhan Ekonomi; (4) Instrumen Dana Pembangunan Islam; (5) Sumber Daya Manusia dalam Ekonomi Pembangunan Islam; dan (6) Indikator Pembangunan Ekonomi Negara Qatar dan Kuwait.

Izinkan kami menghaturkan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, moga ini menjadi amalan pada sisi Allah SWT dan mendapatkan ganjaran pahala tentunya. Tentunya kami berharap menjadi tambahan referensi bagi pengembangan ekonomi dan keuangan Islam.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa buku ini jauh dari sempurna, maka kritik dan saran untuk lebih sempurnanya buku ini sangat diharapkan, tak ada gading yang tak retak.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, Maret 2015

Tim Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR DIAGRAM

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR KOTAK

1

PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pengertian dan Aspek Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi (*economic development*) dan ekonomi pembangunan (*development economics*) sering kali dipakai saling bergantian dengan pengertian yang sama, padahal, dua istilah ini memiliki arti dan orientasi yang berbeda. *"Economic development is the development of economic wealth of countries or regions for the well-being of their inhabitants. The study of economic development is known as development economics"* (Pembangunan ekonomi adalah pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Studi tentang pembangunan ekonomi dikenal sebagai ekonomi pembangunan).[1]

Pembangunan ekonomi merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi. Schumpeter mengungkapkan perbedaan yang lebih lazim antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi mengacu kepada negara maju sedangkan perkembangan ekonomi mengacu pada negara berkembang. (Jhingan, 2013)

---

[1] Mit Witjaksono, Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan, *JESP Vol. 1, No. 1, 2009* mengutip dari *Yahoo.com (Yahoo!Answers).*

Baran (1973) berpendapat bahwa gagasan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri mengesankan suatu peralihan kepada sesuatu yang baru dari sesuatu yang lama yang telah lama digunakan. Pemikir lain mengatakan sering kali kita hanya mengacu kepada pertumbuhan dan kemajuan atau perkembangan hanya sebagai variasi. (Lewis, 1955). Hal ini secara sederhana bisa dilihat dari Gambar 1.1.
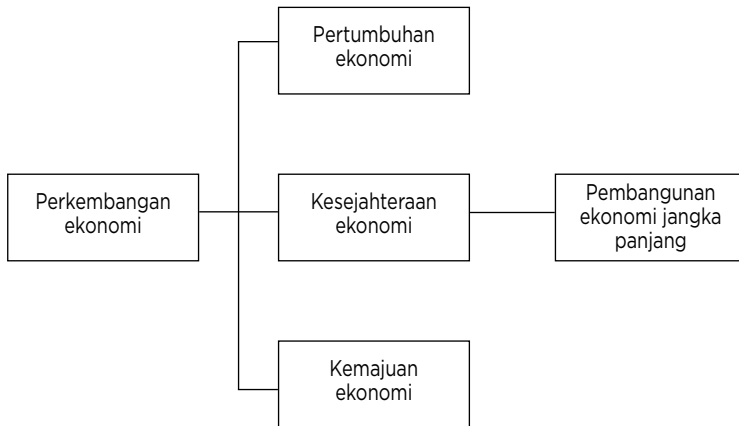
GAMBAR 1.1: Alur Perkembangan Ekonomi.
Sumber: *Diolah dari berbagai macam sumber.*

Gambar di atas menggambarkan bahwa perkembangan ekonomi, mempunyai arti dan tujuan yang sama dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan ekonomi. Ketika hal tersebut sudah terwujud secara nyata dan berlangsung secara terus-menerus, maka hal ini dikatakan sebagai pembangunan ekonomi yang bersifat jangka panjang. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk bisa meningkat. Di sini, terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi secara umum. (Okun dan Richardson, 1961)

1. Pembangunan ekonomi harus diukur dengan kenaikan pendapatan nasional riil dalam jangka waktu panjang. Pendapatan nasional riil adalah output barang-barang jadi dan jasa di negara tersebut, ada dalam bentuk riil artinya bukan fiktif. Jadi, perubahan harga harus dikesampingkan dalam menghitung pendapatan nasional

riil. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi karena pada perekonomian yang sedang dalam keadaan berkembang keanekaragaman harga bisa dipastikan terjadi, sehingga dalam jangka panjang mengakibatkan kenaikan pendapatan riil sedangkan kenaikan jangka pendek dalam pendapatan nasional tidak disebut sebagai pembangunan ekonomi.

Definisi ini sangat lemah karena tidak mempertimbangkan pertumbuhan penduduk karena jika suatu kenaikan dalam pendapatan nasional riil dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, maka yang terjadi bukan perkembangan ekonomi akan tetapi malah kemunduran ekonomi.

2. Kenaikan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang, pendapat para ahli ekonomi tidak jauh berbeda dalam menjelaskan pembangunan ekonomi. Menurut mereka pembangunan ekonomi dikatakan naik apabila terjadi kenaikan output riil per kapita, hal ini dimungkinkan bahwa bagi perkembangan ekonomi tingkat kenaikan pendapatan riil harus lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Peningkatan pendapatan per kapita mungkin tidak menaikkan standar hidup riil penduduk, bisa saja terjadi pendapatan per kapita tinggi namun konsumsi per kapita merosot, rakyat bisa lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk meningkatkan tabungannya, atau pemerintah menghabiskan pendapatannya untuk keperluan militer atau keperluan lain. Di samping itu, ada kemungkinan lain yang terjadi di saat pendapatan per kapita tinggi namun yang terjadi kemiskinan semakin bertambah mungkin hal ini disebabkan pendapatan hanya mengalir di kalangan orang kaya saja. Hal ini yang menyebabkan definisi ini menjadi masalah yang harus diselesaikan bersama untuk mencari solusi yang tepat agar teori ini tidak rancu dengan keadaan riilnya.
3. Ada kecenderungan lain untuk mendefinisikan perkembangan ekonomi dari titik kesejahteraan ekonomi, sebagai contoh perkembangan ekonomi dipandang sebagai proses di mana pada saat pendapatan per kapita bertambah dibarengi dengan penurunan kesenjangan masyarakat dan pemenuhan keinginan masyarakat

secara menyeluruh, namun yang terjadi justru di saat pendapatan per kapita tinggi kesenjangan juga tinggi, artinya ada ketimpangan dalam penyaluran distribusi barang dan jasa. Perkembangan ekonomi seharusnya merupakan sebuah wujud perbaikan terhadap kesejahteraan materiel yang terus-menerus dan berjangka panjang dan lancarnya distribusi barang dan jasa sehingga kesenjangan dapat berkurang secara signifikan.

Setidaknya, ada empat hal yang semestinya bisa diukur dalam menghitung pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara jelas dan riil. Empat hal ini, sebagai berikut (Huda *et al*., 2009):

1. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Penyebaran Pendapatan Individu Rumah Tangga.

   Kendati GNP dikatakan dapat mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar, GNP tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi riil dari output per kapita. Semestinya, penghitungan pendapatan nasional islami harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output per kapita tersebut, karena dari sini nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat, maka akan dengan mudah dikenali seberapa besar rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

   Barangkali inilah yang menjelaskan, ketika Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat miskin, terjadi banyak ketidakpuasan, karena daftar yang riil dari rakyat yang dikategorikan miskin sesungguhnya sangat tidak akurat. Penghitungan dari BPS didasarkan pada survei yang kurang mencerminkan riil yang sesungguhnya, sementara angka GNP memang tidak dapat digunakan untuk mendeteksi jumlah penduduk miskin.

   Demikian pula GNP tidak mampu mendeteksi kegiatan produksi yang tidak ditransaksikan di pasar. Itu artinya, kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuki ke pasar tidak tercatat dalam GNP. Padahal, nilai riil ini sangat memengaruhi kesejahteraan individu. Sesungguhnya angka ini bisa diper-

oleh melalui suatu survei nasional yang menyeluruh. Pendapatan per kapita yang diperoleh melalui survei akan menghasilkan angka yang lebih besar ketimbang GNP per kapita.

Persoalan lainnya yaitu, di dalam penghitungan GNP Konvensional, produksi barang-barang mewah memiliki bobot yang sama dengan produksi barang-barang kebutuhan pokok (Mannan, 1984). Maksudnya, produksi beras yang menghasilkan uang Rp10 juta, sama nilainya produksi perhiasan emas yang juga menghasilkan Rp10 juta. Maka, untuk lebih mendekatkan pada ukuran kesejahteraan, ekonomi Islam menyarankan agar produksi kebutuhan pokok memiliki bobot yang lebih berat ketimbang produksi barang-barang mewah.

2. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Produksi di Sektor Pedesaan.

Sangatlah disadari bahwa tidak mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsistem, namun bagaimanapun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secara subsistem ke dalam penghitungan GNP. Paling tidak, dugaan kasar dari hasil produksi subsistem tersebut harus masuk ke dalam penghitungan pendapatan nasional. Komoditas subsistem ini, khususnya pangan, sangatlah penting di negara-negara Muslim yang baru dalam beberapa dekade ini masuk dalam percaturan perekonomian dunia.

Satu contoh betapa tidak sempurnanya perkiraan produksi komoditas subsistem ini yaitu, kita tidak pernah benar-benar dapat mengetahui berapa sesungguhnya pendapatan masyarakat desa dari sektor subsistem ini. Oleh karena itu, kita juga tidak mengetahui, sekarang kondisinya dan apakah sedang naik atau malah sedang turun. Padahal, informasi itu sangat dibutuhkan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan, khususnya berkaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat lapisan bawah yang secara masa memiliki jumlah terbesar.

Untuk mengetahui tingkat produksi komoditas subsisten ini, harus diketahui terlebih dahulu tingkat harga yang digunakan. Pada umumnya ada dua jenis harga pasar, yakni harga yang secara riil

diterima petani atau diharapkan akan diterima petani, dan satu set harga lainya yaitu nilai yang dibayar konsumen di pasar eceran. Peningkatan produksi pertanian di tingkat rakyat pedesaan, umumnya justru mencerminkan penurunan harga produk-produk pangan di tingkat konsumen sub-urban, atau sekaligus mencerminkan peningkatan pendapatan para pedagang perantara, yang posisinya berada di antara petani dan konsumen. Ketidakmampuan mendeteksi secara akurat pendapatan dari sektor subsisten ini jelas satu kelemahan yang harus segera diatasi, karena di sektor inilah bergantung nafkah rakyat dalam jumlah besar, dan di sinilah inti masalah dari distribusi pendapatan.

3. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Kesejahteraan Ekonomi Islam.

   Kita sudah melihat bahwa angka rata-rata per kapita tidak menyediakan kepada kita informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya. Adalah sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa, sebagai persentase total konsumsi. Hal ini perlu dilakukan karena, kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi dan pelayanan publik lainnya, sesungguhnya bisa menjadi ukuran bagaimana tingkat kesejahteraan dari suatu negara atau bangsa.

   Sungguh menarik untuk mengkaji apa yang dilakukan Nordhaus dan Tobin dengan *Measures for Economics Welfare* (MEW), dalam konteks ekonomi Barat. Jika GNP mengukur hasil, maka MEW merupakan ukuran dari konsumsi rumah tangga yang memberi kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Perkiraan MEW didasarkan kepada asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga yang merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi sesungguhnya sangat bergantung pada tingkat konsumsinya.

   Beranjak dari definisi konsumsi yang ada selain ini, kedua profesor itu lalu membagi jenis konsumsi ke dalam tiga kategori:

   a. Belanja untuk keperluan publik, seperti membuat jalan, jembatan, dan jasa polisi.

b. Belanja rumah tangga, seperti membeli TV, mobil, dan barang-barang yang habis dipakai.
c. Memperkirakan berkurangnya kesejahteraan sebagai akibat urbanisasi, populasi, dan kemacetan.

Di samping tiga kategori di atas, kedua profesor itu juga membuat tiga tambahan pendekatan lagi, yakni:

a. Memperkirakan nilai jasa dari barang-barang tahun lama yang dikonsumsi selama setahun.
b. Memperkirakan nilai dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sendiri, yang tidak melalui transaksi pasar.
c. Memperkirakan nilai dari rekreasi.

Meski MEW ini diukur dalam konteks Barat, konsep ini sebenarnya menyediakan petunjuk-petunjuk yang berharga untuk memperkirakan level kebutuhan hidup minimum secara Islami.

4. Penghitungan Pendapatan Nasional sebagai Ukuran dari Kesejahteraan Sosial Islami Melalui Pendugaan Nilai Santunan Antarsaudara dan Sedekah.

   Kita tahu bahwa GNP adalah ukuran moneter dan tidak memasukkan *transfers payments* seperti sedekah. Namun haruslah disadari, sedekah memiliki peran yang signifikan di dalam masyarakat Islam. Dan ini bukan sekadar pemberian secara sukarela pada orang lain melainkan merupakan bagian kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama. Di dalam masyarakat Islam, terdapat satu kewajiban menyantuni kerabat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Meski tidak mudah memperoleh datanya, upaya mengukur nilai dari pergerakan dana semacam ini dapat menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk mendalami bekerjanya sistem keamanan sosial yang mengakar di masyarakat Islam.

   Di sejumlah negara Muslim, jumlah dan kisaran, dari kegiatan dan transaksi yang didasarkan pada keinginan untuk melakukan amal kebajikan, memiliki peran lebih penting dibanding di negara Barat. Tidak hanya karena luasnya kisaran dari kegiatan ekonomi yang diambil alih oleh keluarga maupun suku, tetapi juga ada begitu banyak ragam kewajiban santunan di antara anggota keluarga.